

S.O.P.

SIMDA PEND...

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dan *clean government* dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan harus disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk itu, pemerintah daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Sistem tersebut juga harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah menetapkan visi organisasi yakni *Menjadi Katalisator Bagi Kesuksesan Otonomi Daerah Melalui Pengawasan Profesional di Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah*, dengan salah satu misinya yaitu mendorong dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sistem penyelenggaraan keuangan daerah. Dalam rangka melaksanakan misi tersebut maka dilakukan kegiatan penyusunan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang dapat membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya. Pengembangan teknologi informasi sebagai pendukung sistem pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan membuat program aplikasi keuangan daerah yaitu Program Aplikasi SIMDA Pendapatan sebagai kelanjutan dari versi sebelumnya.

Untuk melengkapi implementasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah menggunakan aplikasi Simda Keuangan versi 2.1 di pemerintah daerah maka tim pengembangan aplikasi simda akan mengembangkan subsistem pendapatan yang akan dapat digunakan khusus untuk pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah sesuai ketentuan dan praktik pengelolaan yang baik.



Modul SOP SIMDA Pendapatan

Sebagai pelengkap pengembangan Program Aplikasi SIMDA Pendapatan tersebut, maka disusun pedoman pengoperasian sebagai petunjuk bagi para pengguna untuk mengoperasikan Aplikasi SIMDA Pendapatan. Buku ini disajikan dalam bentuk tutorial tahap demi tahap yang singkat dan praktis agar menuntun penggunaan aplikasi memahami fasilitas yang dimiliki aplikasi SIMDA Pendapatan.

Penyusunan buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu segala saran dan kritik dari para pembaca dan pengguna akan kami terima sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan upaya yang telah serta akan terus dilakukan, mendapat rahmat dan hidayahNya.

**Penanggung jawab
Tim Pengembangan Aplikasi SIMDA**

simd@

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Umum.....	1
2. Persiapan Aplikasi	1
1) Instalasi SQL Server.....	1
2) Restore Database.....	2
3) Instalasi SIMDA Pendapatan	6
4) Setting Koneksi SIMDA Pendapatan.....	8
BAB II. MENU APLIKASI: FILE	10
1. Login	10
2. Logout	11
3. Ganti Password	11
4. Pengaturan User	12
5. Pengaturan User Akses.....	14
6. Keluar.....	16
BAB III. MENU APLIKASI: PARAMETER.....	17
1. Data Umum Pemda	17
2. Unit Organisasi.....	18
3. Data Umum Organisasi	19
4. Penandatangan Dokumen	21
5. Peraturan Terkait.....	23
6. Rekening	23
7. Mapping Rekening Pajak.....	24
8. Mapping Rekening Retribusi.....	25
9. Parameter Kecamatan – Kelurahan.....	26
10. Parameter Bank.....	27
11. Parameter Perhitungan Pajak.....	28
12. Parameter Perhitungan Sanksi	33
13. Parameter BPHTB	33
BAB IV. MENU APLIKASI: DATA ENTRY	35
1. Pendaftaran – Pajak – Pribadi	35
2. Pendaftaran – Pajak – Badan	36
3. Pendaftaran – Retribusi – Pribadi	37
4. Pendaftaran – Retribusi – Badan	38
5. Pendataan – Pajak – Wajib Pajak (WP).....	39
6. Pendataan – Pajak – SPTPD Masa	42
7. Pendataan – Pajak – Teguran SPTPD	45
8. Pendataan – Retribusi – Wajib Retribusi.....	48
9. Pendataan – Retribusi – SPTRD	51
10. Penetapan – Pajak – Nota Perhitungan	53
11. Penetapan – Pajak – SKPD.....	56

12. Penetapan – Retribusi – SKRD	58
13. Penagihan – Pajak – STPD	60
14. Penagihan – Pajak – Keberatan – Surat Keberatan.....	63
15. Penagihan – Pajak – Keberatan – Persetujuan Keberatan	63
16. Penagihan – Pajak – Angsuran – Surat Angsuran.....	64
17. Penagihan – Pajak – Angsuran – Persetujuan Angsuran.....	66
18. Bendahara Penerimaan – Pajak – SSPD.....	66
19. Bendahara Penerimaan – Pajak – STS	68
20. Bendahara Penerimaan – Retribusi – SSRD	70
21. Bendahara Penerimaan – Retribusi – Bukti Penerimaan	73
22. Bendahara Penerimaan – Retribusi – STS	75
23. Bendahara Penerimaan – Lain-Lain – Bukti Penerimaan.....	77
24. Pembukuan dan Pelaporan – Validasi SSPD	80
25. Pembukuan dan Pelaporan – Saldo Awal Kas.....	81
26. Pembukuan dan Pelaporan – Saldo Awal Piutang – Pajak	83
27. Pembukuan dan Pelaporan – Proses Saldo Piutang Akhir	85
 BAB V. MENU APLIKASI: LAPORAN	86
1. Umum: Menyimpan Laporan atau Mencetak ke Printer	86
2. Parameter.....	89
3. Pendaftaran Pajak	89
4. Pendaftaran Retribusi	90
5. Pendataan Pajak	91
6. Pendataan Retribusi	91
7. Penetapan Pajak	92
8. Penetapan Retribusi	93
9. Penagihan	94
10. Bendahara Penerimaan – Pajak	95
11. Bendahara Penerimaan – Retribusi	96
12. Pembukuan dan Pelaporan	97
 BAB VI. MENU APLIKASI: TOOL	99
1. Setting	99
2. Kosongan Data	100
3. Export Bukti Penerimaan	101
4. Export Surat Tanda Setoran	102
5. Export Saldo Awal	103
6. Export Pendapatan	104
7. Import Rekening	105
8. Import DPA.....	106
9. Import Saldo Awal	107
10. Import Pendapatan	108
11. Import Sismiop (PBB)	109
 BAB VII. MENU APLIKASI: HELP	111
1. ManSis	111
2. Contact Us.....	111
 TIM PENYUSUN MODUL	113

Tim Penyusun Modul

Pengarah

Iman Bastari

Penanggung Jawab

Sri Penny Ratnasari

Wakil Penanggung Jawab

MA Rosady Sambas

Nyoman Suprayatna

Ketua

Aisyah

Anggota

Nur Israini

Irene YK

Wiwik Priyantoro

Yan Berhen Sitompul

Iwan Ari Sulistiyono

Dwi Iwan Susanto

Hanin Widagdo

Agus Budi Priyono

Jati Kusuma

Yadi Yose Safari

Asyjani Devi

Minang Ermansyah

Herry Sulisyo

Dora Bernadishman

SIMDA

Pedoman Pengoperasian Aplikasi Simda V21
Pembukuan dan Pelaporan Keuangan

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dan *clean government* dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan harus disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk itu, pemerintah daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Sistem tersebut juga harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah menetapkan visi organisasi yakni menjadi katalisator bagi kesuksesan otonomi daerah melalui pengawasan profesional di bidang penyelenggaraan keuangan daerah, dengan salah satu misinya yaitu mendorong dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sistem penyelenggaraan keuangan daerah. Dalam rangka melaksanakan misi tersebut maka dilakukan kegiatan penyusunan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang dapat

Pedoman Pengoperasian Aplikasi Simda V21
Pembukuan dan Pelaporan Keuangan

membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya. Pengembangan teknologi informasi sebagai pendukung sistem pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan membuat program aplikasi keuangan daerah yaitu Program Aplikasi SIMDA versi 2.1 sebagai penyempurnaan dari versi sebelumnya.

Sebagai pelengkap pengembangan Program Aplikasi SIMDA Versi 2.1 tersebut, maka disusun buku pedoman pengoperasian sebagai petunjuk bagi para pengguna untuk mengoperasikan Aplikasi SIMDA versi 2.1. Buku ini disajikan dalam bentuk tutorial tahap demi tahap yang singkat dan praktis agar menuntun penggunaan aplikasi memahami fasilitas yang dimiliki aplikasi SIMDA versi 2.1.

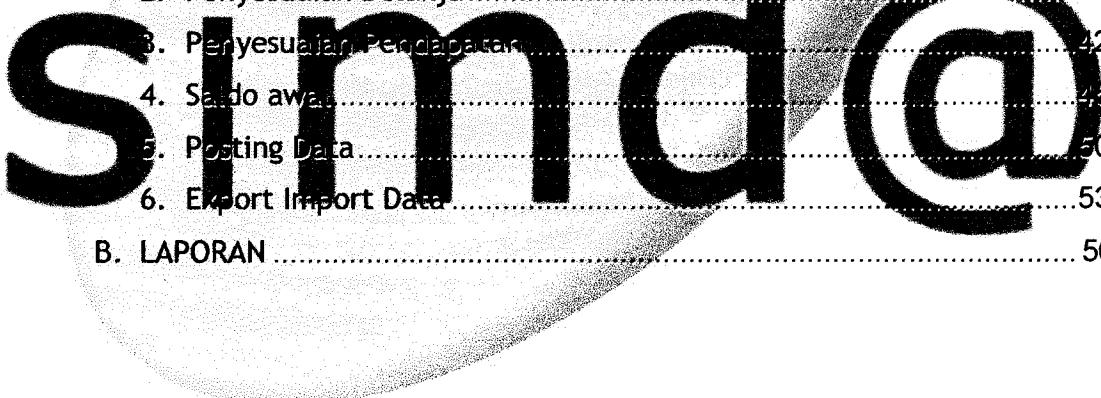
Penyusunan buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu segala saran dan kritik dari para pembaca dan pengguna akan kami terima sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan upaya yang telah dan akan terus dilakukan, mendapatrahmat dan hidayahNya.



Pedoman Pengoperasian Aplikasi Simda V21
Pembukuan dan Pelaporan Keuangan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I. SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	4
A. MENU PEMBUKUAN	4
1. Jurnal.....	4
2. Penyesuaian Pendapatan.....	9
3. Saldo awal.....	13
4. Posting Data.....	18
5. Export Import Data	21
B. LAPORAN	24
BAB II. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.....	32
A. MENU PEMBUKUAN SKPD	32
1. Jurnal	32
2. Penyesuaian Belanja	36
3. Penyesuaian Pendapatan	42
4. Saldo awal	45
5. Posting Data	50
6. Export Import Data	53
B. LAPORAN	56



Pedoman Pengoperasian Aplikasi Simda V21
Pembukuan dan Pelaporan Keuangan

Tim Pengembang Aplikasi SIMDA BPKP Pusat

Pengarah

Djadja Sukirman, Ak., M.B.A.

Penanggung Jawab

Drs. T.B. Aan Adiwisastra

Nara Sumber

A. Karim, Ak., MM

Drs. Rustam Wahjudi

Koordinator

I Nyoman Sardiana, AK. MM

Doddy Setiadi, Ak., MM., BAP

Tim Pengembang

Aisyah, SE

Nur Iskaini, Ak.

Irene SK, Ak.

Ilwik Priyantoro, Ak

Meidijanto, Ak

Yan Berhen S, Ak

Sukamto, Ak

Iwan Ari Sulistiyono, SST

Dwi Iwan Susanto, Ak

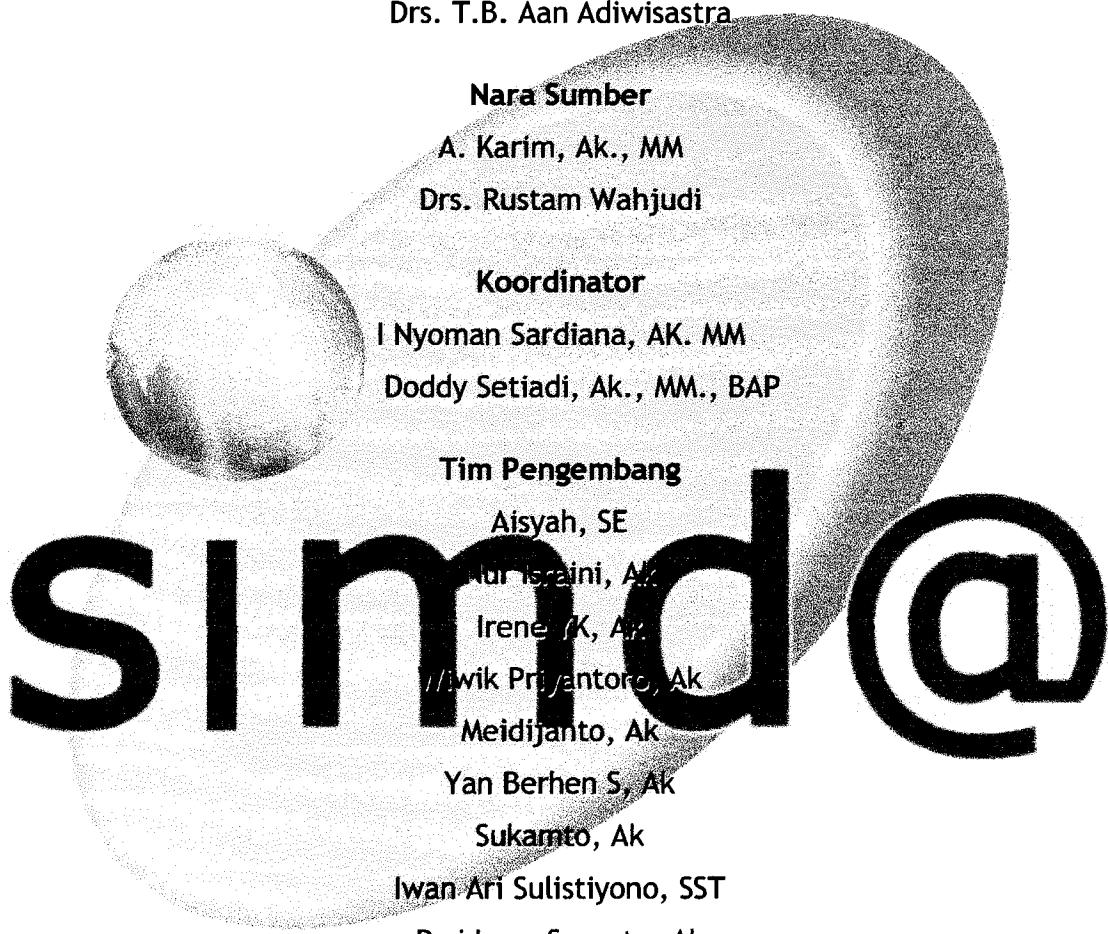
Jati Kusuma

Sri Minarni, SE

Agviani Devi, Amd.Kom

Nur Hayati Purwastuti,Amd.Kom

Yadi Yose Safari



Pedoman Pengoperasian Aplikasi Penatausahaan Keuangan

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dan *clean government* dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan harus disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk itu, pemerintah daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Sistem tersebut juga harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah menetapkan visi organisasi yakni menjadi katalisator bagi kesuksesan otonomi daerah melalui pengawasan profesional di bidang penyelenggaraan keuangan daerah, dengan salah satu misinya yaitu mendorong dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sistem penyelenggaraan keuangan daerah. Dalam rangka melaksanakan misi tersebut maka dilakukan kegiatan penyusunan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang dapat membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya. Pengembangan teknologi informasi sebagai pendukung sistem pengelolaan keuangan telah dilakukan

Pedoman Pengoperasian Aplikasi Penatausahaan Keuangan

dengan membuat program aplikasi keuangan daerah yaitu Program Aplikasi SIMDA versi 2.1 sebagai penyempurnaan dari versi sebelumnya.

Sebagai pelengkap pengembangan Program Aplikasi SIMDA Versi 2.1 tersebut, maka disusun buku pedoman pengoperasian sebagai petunjuk bagi para pengguna untuk mengoperasikan Aplikasi SIMDA versi 2.1. Buku ini disajikan dalam bentuk tutorial tahap demi tahap yang singkat dan praktis agar menuntun penggunaan aplikasi memahami fasilitas yang dimiliki aplikasi SIMDA versi 2.1.

Penyusunan buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu segala saran dan kritik dari para pembaca dan pengguna akan kami terima sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan upaya yang telah dan akan terus dilakukan, mendapat rahmat dan hidayahNya.

Tim Pengembangan Aplikasi SIMDA

Simd@

Pedoman Pengoperasian Aplikasi Penatausahaan Keuangan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	1
BAB I. SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	3
A. BENDAHARA UMUM DAERAH	3
1. Ekspor Impor Data.....	3
1) Ekspor Data SPD/SP2D/STS	3
2) Impor Data SPM/Panjar/STS	10
2. Anggaran Kas.....	18
3. Pembuatan SPD.....	20
4. SPP Non Anggaran	26
5. SPM Non Anggaran	29
6. Pembuatan SP2D	33
7. Daftar Penguji SP2D.....	40
8. Realisasi Pencairan SP2D	44
9. Penerimaan Pendapatan	46
10. Penerimaan Pembayaran	50
11. Sisa Setoran UP	52
12. Transfer Antar Bank	54
B. LAPORAN	56
1. SPD	57
2. BUD	58
BAB II. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	63
A. BENDAHARA	63
1. Pengeluaran	63
1) Pembuatan SPP	63
2) Panjar dan SPJ Panjar	80
3) SPJ	84
4) Pajak	91
5) Ekspor Data Panjar/SPJ Panjar/Pajak	97
2. Penerimaan	100

*Pedoman Pengoperasian Aplikasi
Penatausahaan Keuangan*

1) Bukti Penerimaan.....	101
2) STS.....	104
3) Ekspor Impor Data Bukti Penerimaan/STS	109
B. TATA USAHA	115
1. Ekspor Impor Data SPM/SPD/SP2D.....	115
1) Ekspor Data SPM.....	115
2) Impor Data SPD.....	118
3) Impor Data SP2D	121
2. Verifikasi SPP	122
3. Pembuatan SPM	125
4. Pengesahan SPJ.....	132
C. LAPORAN	134
1. Bendahara.....	135
1) Bendahara Penerimaan.....	135
2) Bendahara Pengeluaran.....	136
2. Tata Usaha	140

Simda

*Pedoman Pengoperasian Aplikasi
Penatausahaan Keuangan*

Tim Pengembang Aplikasi SIMDA BPKP Pusat

Pengarah

Djadja Sukirman, Ak., M.B.A.

Penanggung Jawab

Drs. T.B. Aan Adiwisastra

Nara Sumber

A. Karim, Ak., MM

Drs. Rustam Wahjudi

Koordinator

I Nyoman Sardiana, AK. MM

Doddy Setiadi, Ak., MM., BAP

Tim Pengembang

Aisyah, SE

Nur Ismailini, Ak.

Irene K, Ak.

Wiwik Priyantoro, Ak

Meidijanto, Ak

Yan Berhen S, Ak

Sukamto, Ak

Iwan Ari Sulistiyono, SST

Dwi Iwan Susanto, Ak

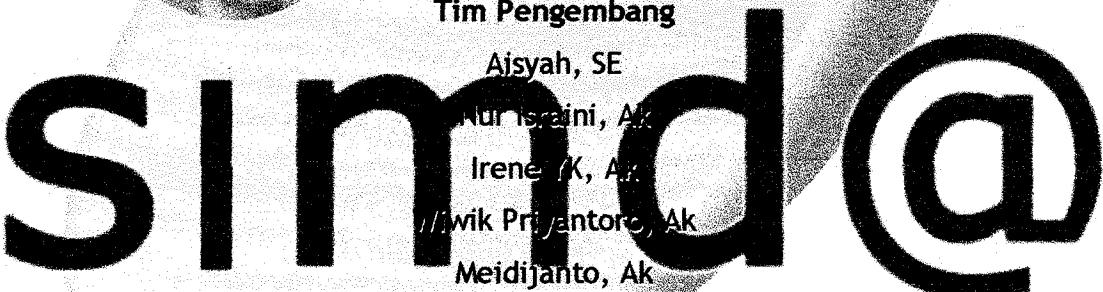
Jati Kusuma

Sri Minarni, SE

Agviani Devi, Amd.Kom

Nur Hayati Purwastuti,Amd.Kom

Yadi Yose Safari

The logo consists of the word "simda" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letter "i" has a small circle to its left, and the letter "d" has a small circle to its right, creating a stylized '@' symbol. The entire word is set against a large, light gray, semi-transparent circular background.

Pedoman Pengoperasian Aplikasi Penyusunan Anggaran

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dan *clean government* dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan harus disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk itu, pemerintah daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Sistem tersebut juga harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah menetapkan visi organisasi yakni menjadi katalisator bagi kesuksesan otonomi daerah melalui pengawasan profesional di bidang penyelenggaraan keuangan daerah, dengan salah satu misinya yaitu mendorong dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sistem penyelenggaraan keuangan daerah. Dalam rangka melaksanakan misi tersebut maka dilakukan kegiatan penyusunan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang dapat membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya. Pengembangan teknologi informasi sebagai pendukung sistem pengelolaan keuangan telah dilakukan

Pedoman Pengoperasian Aplikasi Penyusunan Anggaran

dengan membuat program aplikasi keuangan daerah yaitu Program Aplikasi SIMDA versi 2.1 sebagai penyempurnaan dari versi sebelumnya.

Sebagai pelengkap pengembangan Program Aplikasi SIMDA Versi 2.1 tersebut, maka disusun buku pedoman pengoperasian sebagai petunjuk bagi para pengguna untuk mengoperasikan Aplikasi SIMDA versi 2.1. Buku ini disajikan dalam bentuk tutorial tahap demi tahap yang singkat dan praktis agar menuntun penggunaan aplikasi memahami fasilitas yang dimiliki aplikasi SIMDA versi 2.1.

Penyusunan buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu segala saran dan kritik dari para pembaca dan pengguna akan kami terima sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan upaya yang telah dan akan terus dilakukan, mendapat rahmat dan hidayahNya.

Penanggung jawab

Tim Pengembangan Aplikasi SIMDA

Simda 
Syafri Azzam Baharuddin, Ak., MBA

*Pedoman Pengoperasian Aplikasi
Penyusunan Anggaran*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Umum.....	6
B. Pengoperasian Program Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	6
1. Bentuk Frame	7
2. Bentuk Browse.....	7
3. Bentuk Form	9
4. Istilah-istilah.....	11
BAB II PENYUSUNAN ANGGARAN PADA SKPKD	13
A. File.....	13
1. Login.....	14
2. Logout	15
3. Ganti Password.....	15
4. Buat User Baru.....	17
5. Otoritas User Menu.....	19
6. Printer Setup.....	20
7. Keluar.....	21
8. Keluar dan Shut Down Windows.....	22
B. Parameter	22
1. Data Umum Pemda.....	23
2. Peraturan Daerah.....	24
3. Program Kegiatan	26
4. Unit Organisasi	27
5. Tim Anggaran.....	30
6. Penanda Tangan Dokumen	32
7. Rekening.....	33
8. Korolari	34
9. Rekening LRA	37
10. Rekening Potongan SPM	38

Pedoman Pengoperasian Aplikasi Penyusunan Anggaran

11. Sumber Dana.....	40
12. Bank.....	41
13. Standar Harga	43
C. DATA ENTRY.....	46
1. Ekspor Impor Data	46
2. Posting Data Anggaran	54
3. DPA SKPD.....	56
D. LAPORAN.....	58
1. Unit Organisasi	58
2. Laporan Anggaran Lainnya	63
E. TOOL	63
1. Kosongkan Data	63
2. Perbedaan Data.....	64
3. Perubahan Status.....	67
4. Copy Data Belanja	71
5. Copy Data Standar Harga	72
6. Copy Data Antar Tahun.....	74
7. Backup & Restore.....	75
8. Update Database.....	76
9. Multi Export Import	78
10. Impor Data SPM Gaji.....	91
11. Setting.....	91
F. HELP	93
1. SIMDA Help.....	93
2. About Simda.....	93
BAB III PENYUSUNAN ANGGARAN PADA SKPD	95
A. DATA ENTRY.....	95
1. Renstra SKPD	95
2. RKA SKPD	105
3. Ekspor Impor Data Parameter/Renstra/Anggaran/DPA & DPPA.....	124
4. Anggaran Kas	131
B. LAPORAN.....	134

*Pedoman Pengoperasian Aplikasi
Penyusunan Anggaran*

1. Renstra.....	135
2. RKA SKPD	139

simd@

Pedoman Pengoperasian Aplikasi Simda V21
Pembukuan dan Pelaporan

Tim Pengembang Aplikasi SIMDA BPKP Pusat

Pengarah

Djadja Sukirman, Ak., M.B.A.

Penanggung Jawab

Drs. T.B. Aan Adiwisastra

Nara Sumber

A. Karim, Ak., MM

Drs. Rustam Wahjudi

Koordinator

I Nyoman Sardiana, AK. MM

Doddy Setiadi, Ak., MM., BAP

Tim Pengembang

Aisyah, SE

Nur Ismailini, Ak

Irene HK, Ak

Ulik Priyatoro, Ak

Meidjanto, Ak

Yan Berhen Syak

Sukameo, Ak

Iwan Ari Sulistiyono, SST

Dwi Iwan Susanto, Ak

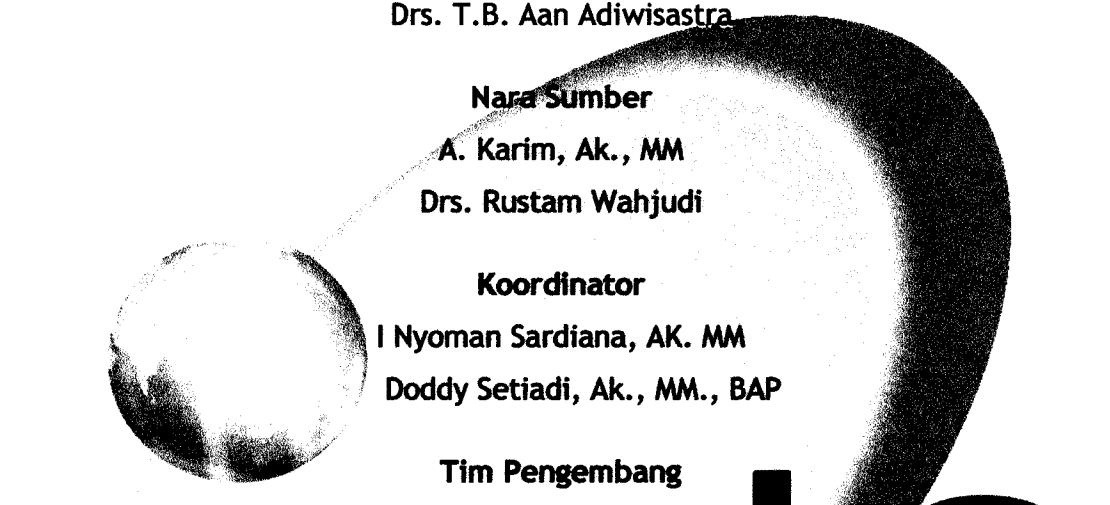
Jati Kusuma

Sri Minarni, SE

Agviani Devi, Amd.Kom

Nur Hayati Purwastuti,Amd.Kom

Yadi Yose Safari



Simda@